

KESULTANAN
PALEMBANG
DARUSSALAM

Pejarah dan Warisan Budayanya



Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.
Dr. Eko Crys Endrayadi, M. Hum





KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

SEJARAH DAN WARISAN BUDAYANYA

KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

SEJARAH DAN WARISAN
BUDAYANYA

Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.
Dr. Eko Crys Endrayadi, M. Hum

Diterbitkan oleh:



**Kesultanan Palembang Darussalam – Sejarah Dan Warisan
Budayanya**

Copyright Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.

Dr. Eko Crys Endrayadi, M. Hum, 2016

Peneliti: Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.

Dr. Eko Crys Endrayadi, M. Hum

Asisten Penulis: Andi Hariyanto

Koleksi Foto: Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D. , Dr. Eko

Crys Endrayadi, M. Hum, Dokumen

Cetakan Pertama April 2016

ISBN: ~~978-602-9030-26-6~~

~~929.2~~

NA

Nawiyanto, dkk

s

Sejarah -- Jember: Jember University Press, 2016

xv, 185 hlm, 23 cm

1. SEJARAH

I. Judul

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari penerbit

Diterbitkan pertama kali oleh Jember University Press dan

Penerbit Tarutama Nusantara

Pewajah Isi dan Kover: Dzikri Abdi Setia

Daftar Isi

DAFTAR ISI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	3
Lingkup dan Permasalahan.....	7
Metode.....	8
Organisasi penulisan	11
BAB 2 PALEMBANG MASA PRA KESULTANAN	13
Kerajaan Sriwijaya.....	15
Kerajaan Suwarnabhumi.....	21
BAB 3 KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM	25
Masa Pembentukan	27
Masa Kebangkitan dan Kejayaan.....	35
Masa Berakhirnya Kesultanan dan Pengaruhnya	42
BAB 4 STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT	47
Struktur Pemerintahan	49
Struktur Masyarakat	54
Karakter Masyarakat	60
BAB 5 PEREKONOMIAN	67
Penduduk Palembang	70
Pertanian, Perikanan, dan Kerajinan	73
Perdagangan.....	77
Perdagangan Timah.....	80
Perdagangan Lada.....	82
BAB 6 PERTAHANAN DAN KEAMANAN	85

Sistem Pertahanan	87
Benteng Pertahanan	93
Aparat Pertahanan dan Keamanan	101
Fungsi Keluarga	105
BAB 7 BANGUNAN BERSEJARAH	109
Masjid	111
Masjid Agung Palembang.....	111
Masjid Merogan	115
Masjid Suro	116
Benteng Kuto Besak	117
Benteng Kuto Gawang	120
Keraton Beringin Janggut.....	122
Keraton Kuto Kecik	122
Makam-Makam Sultan Palembang	123
Kompleks Makam Gede ing Suro.	125
Makam Nyi Geding Pembayun.	126
Makam Candi Angsoko.....	126
Kompleks Makam Candi Laras	126
Kompleks Makam Sabo Kingking.....	126
Kompleks Makam Sako Tigo (OKI).....	128
Kompleks Makam Candi Walang.....	128
Kompleks Makam Kebon Gede.....	129
Makam Sultan Agung.....	129
Kompleks Makam Kawah Tengchurep.....	129
Kompleks Makam Susuhunan Ratu Machmud Badaruddin	131
Rumah Limas	132
BAB 8 SENI DAN BUDAYA MASYARAKAT PALEMBANG	139
Busana (Fashion)	141
Kuliner Khas Palembang	155
Adat Menerima Tamu	160
Bahasa dan Sastra	162
Seni Tari.....	165

DAFTAR PUSTAKA.....	173
GLOSARIUM.....	180
INDEKS.....	182
BIODATA PENULIS	186

KATA PENGANTAR

Buku ini hadir berasal dari hasil penelitian yang dilakukan Tim Peneliti sejak bulan Agustus 2015 hingga Februari 2016. Sebagai dokumentasi sejarah, kehadiran buku ini merupakan upaya ke arah penyusunan gambaran sejarah yang lebih utuh mengenai Kesultanan Palembang Darussalam dan warisan sejarahnya. Hal ini dipandang mempunyai makna penting mengingat tulisan-tulisan yang sudah ada mengenai Kesultanan Palembang masih bersifat fragmentaris, serta menonjolkan aspek-aspek tertentu secara terpisah.

Gambaran yang lebih utuh dipandang akan mampu memberi pemahaman yang lebih baik tentang keberadaan dan peranan yang dimainkan Kesultanan Palembang Darussalam pada masa lalu dan warisan yang ditinggalkannya.

Identitas kota, budaya dan karakter masyarakat Palembang yang masih tampak hingga sekarang ini merupakan produk dari proses sejarah yang panjang. Kejadian-kejadian dan proses sejarah pada masa Kesultanan Palembang Darussalam merupakan faktor penting yang ikut berpengaruh dalam pembentukan identitas budaya dan perkembangan masyarakat Palembang.

Tim Peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak R. Abdul Kahar Muzakir, Direktur Utama PT Tarutama Nusantara (TTN) Jember, yang telah mendanai kegiatan penelitian ini.

Kehadiran buku ini merupakan ungkapan dan bukti nyata begitu besarnya minat dan perhatian Beliau terhadap warisan sejarah bangsa, khususnya sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, yang telah memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah Indonesia, termasuk dalam melawan imperialisme dan kolonialisme Barat.

Sebagai sosok pribadi yang secara genealogis mempunyai hubungan darah dengan Sultan Mahmud Badaruddin II, minat Beliau terhadap penulisan sejarah Kesultanan Palembang dan warisannya dapat dipandang sebagai ungkapan rasa memiliki dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas masa lalu leluhurnya. Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang telah Beliau berikan kepada Tim Peneliti.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga Tim Peneliti sampaikan kepada Bapak Andi Hariyanto untuk semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan untuk kelancaran penelitian ini, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan, khususnya selama pengumpulan bahan-bahan penulisan di Palembang.

Terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan: 1) Bapak Puji Winardi (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta); 2) Dr. Farida (Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya); 3) Bapak Yanuar Rozanof, yang telah memandu dan membuka akses bagi tim dalam pengumpulan data penelitian di Palembang sehingga kegiatan berjalan lancar dan sangat menyenangkan; 4) Ir. Taupik Gunawan (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan).

Terima kasih juga disampaikan atas bantuan yang tim peneliti terima dari Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja dan Bapak Ali Hanafiah (Kepala Museum Sultan Mahmud Badarrudin II di Palembang) atas kesediaan untuk berbagi informasi dan wawasan tentang sejarah dan budaya Palembang. Tim juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat kami sebut satu persatu

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pemangku kepentingan

khususnya mereka yang menaruh perhatian terhadap pelestarian sejarah dan warisan budaya Kesultanan Palembang Darussalam. Kritik dan masukan dari sidang pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Jember, Februari 2016

Tim Penulis



Bab 1

Pendahuluan

Latar Belakang

Keberadaan negara dan masyarakat Indonesia telah mendapatkan akar-akar sejarah dan sendi-sendinya sejak masa sebelum penjajahan Barat atas wilayah Nusantara. Masa pra-kolonial yang meliputi kurun waktu yang cukup panjang telah memperlihatkan pendirian dan pasang-surut berbagai kerajaan yang menguasai sebagian atau bahkan seluruh wilayah Nusantara. Sejarah telah mencatat berbagai kerajaan Hindu-Budha yang muncul di Nusantara seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan, Kerajaan Kalingga dan Mataram Hindhu di Jawa Tengah, Kerajaan Medang, Singasari, Jenggala, Kediri, dan Majapahit di Jawa Timur, serta Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Masuknya Islam telah memunculkan berbagai kerajaan Islam di Jawa seperti Demak, Pajang, Mataram, Banten dan Cirebon, sedangkan di Sumatera misalnya Kerajaan Aceh dan Palembang. Masa kejayaan kerajaan-kerajaan tradisional di wilayah Nusantara pada masa lalu umumnya dikaitkan dengan masa pemerintahan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur dan Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di Sumatera (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990).

Banyak tulisan telah dihasilkan mengenai kerajaan-kerajaan besar di Nusantara baik oleh ilmuwan asing maupun ilmuwan Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah membahas secara mendalam mengenai Kerajaan Majapahit dan berbagai aspeknya, misalnya yang banyak dilakukan oleh R.B. Slamet Muljana (2011). Demikian juga, berbagai tulisan mengenai Kerajaan Sriwijaya telah diterbitkan sejumlah pakar, di antaranya yang penting untuk disebut adalah George Coedes (1992) dan R.B. Slamet Muljana (2006). Selain kedua kerajaan besar yang merepresentasikan kejayaan masa lalu Indonesia, kajian-kajian mengenai Kerajaan Mataram dan kedua pecahannya, yakni

Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta juga telah banyak dilakukan.

Kajian mendalam yang dilakukan sejumlah ahli secara terpisah mengenai Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, misalnya oleh M.C. Ricklefs (2002) dengan karya berjudul *Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi*, Vincent Houben (2002) dengan karya *Keraton dan Kompeni*, Darsiti Soeratman (1989) dengan karya *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta*, dan George D. Larson (1990) dengan kajian *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta*. Karya-karya ini dan sejumlah karya lain yang telah dihasilkan misalnya oleh Moedjanto (1987) membuktikan betapa pentingnya kedudukan dan peranan kedua kraton dalam perkembangan sejarah Indonesia. Besarnya perhatian yang telah diberikan dalam dokumentasi sejarah atas kerajaan Mataram Islam dan penerusnya tidak terlepas dari eksistensi dan peran yang mereka mainkan pada masa kolonial Belanda, masa perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia dan bahkan sebagian terus berlanjut hingga dewasa ini. Hal ini sangat kentara terlihat dalam kasus Kesultanan Yogyakarta sehingga kemudian mendapat status khusus sebagai sebuah daerah istimewa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tulisan-tulisan mengenai Kesultanan Palembang Darussalam di Sumatera relatif masih terbatas, manakala dibandingkan dengan tulisan-tulisan mengenai Kerajaan Mataram dan keempat pecahannya, yakni Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Sedikitnya tulisan tentang Kesultanan Palembang tidak terlepas dari fakta bahwa keberadaan kesultanan ini secara politis telah berakhir setelah dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1824. Tentu saja nasib yang dialaminya berbeda dengan pecahan-pecahan Kerajaan Mataram yang secara politis ataupun kultural tetap bertahan hingga saat ini. Likuidasi Kesultanan Palembang

secara politis jelas mengindikasikan bahwa pemerintah kolonial Belanda memandang keberadaannya sebagai ancaman yang membahayakan tatanan dan kekuasaan kolonial. Bukti sejarah berupa pertempuran melawan kekuasaan kolonial memang membuktikan patriotisme dan heroisme Kesultanan Palembang tidak bisa dikatakan kecil. Kesultanan Palembang Darussalam termasuk kekuatan politik yang sejak awal menunjukkan sikap anti kolonial yang sangat kuat baik terhadap kekuasaan Inggris maupun Belanda. Kesultanan Palembang terbukti telah melahirkan figur pejuang yang kemudian pada masa kemerdekaan mendapatkan pengakuan secara resmi atas jasanya dalam perjuangan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional, yakni Sultan Mahmud Badaruddin II. Atas jasa-jasanya tersebut, tokoh pahlawan ini bahkan kemudian ditampilkan lukisannya untuk menghiasi uang kertas yang diterbitkan Bank Indonesia.

Terlepas dari kedua penghargaan tersebut, keberadaan Kesultanan Palembang bisa dikatakan belum mendapatkan perhatian dan representasi secara memadai dalam dokumentasi dan publikasi sejarah. Memang beberapa publikasi telah memberi sumbangan berharga tentang keberadaan dan peranan Kesultanan Palembang dalam sejarah, khususnya dalam kaitan dengan perlawanan terhadap kekuasaan asing, misalnya yang dihasilkan oleh Johan Hanafiah (1986) mengenai Perang Palembang dan (1989) tentang upaya Palembang mempertahankan kedaulatan politiknya. Kontribusi berharga juga telah diberikan oleh Rahim (1998) tentang pejabat agama di Kesultanan Palembang, dan Mestika Zed (2003) yang berjudul *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. Beberapa tulisan lain menyoroti berbagai aspek historis dari kebudayaan dan masyarakat Palembang pada masa Kesultanan Palembang, masa kolonial Belanda, maupun masa kemerdekaan,

termasuk di antaranya karya Mahmud (2007) tentang *Sejarah Palembang*, dan karya Jumhari (2010) tentang *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab dan Cina di Palembang dari Masa Kesultanan Palembang hingga Reformasi*.

Karya-karya tersebut dapat dipastikan belum menggambarkan secara utuh keberadaan dan peranan Kesultanan Palembang Darussalam. Ada bagian-bagian dari masa lalunya yang belum dieksplorasi dan dijadikan bahan dalam membangun kisah sejarah Kesultanan Palembang secara lebih utuh. Hal ini tentu saja akan merugikan karena Kesultanan Palembang dan peranan yang dimainkannya belum tergambarkan secara memadai dalam penulisan sejarah dan memori kolektif bangsa. Bagian-bagian tersebut kalau dibiarkan lambat laun akan dilupakan. Apalagi secara politis Kesultanan Palembang memang tidak lagi eksis. Hilangnya kedaulatan politik sejak masa kolonial Belanda memang membawa kerugian besar bagi kelangsungan Kesultanan Palembang sebagai otoritas politik dan kultural. Kerugian tersebut akan bertambah besar ketika dokumentasi dan publikasi mengenai Kesultanan Palembang tidak dilakukan secara memadai dan terus-menerus. Memang sebagian kisah mengenai Kesultanan Palembang masih terekam dalam catatan-catatan yang disimpan oleh keturunan keluarga dan kerabat Kesultanan Palembang. Akan tetapi, catatan-catatan tersebut tidak banyak bisa diakses oleh publik dan masih merupakan bahan mentah, sehingga masih menampilkan sosok “kerangka tanpa daging”, atau belum membentuk “kisah sejarah yang utuh”.

Dalam konteks tersebut pendokumentasian sejarah Kesultanan Palembang menjadi kebutuhan penting agar salah satu kekayaan sejarah bangsa tidak hilang dari kenangan dan dilupakan. Pendokumentasian sejarah Kesultanan Palembang dipandang sebagai kebutuhan penting karena bangsa Indonesia perlu mengetahui dan belajar dari masa lalunya baik yang pahit maupun yang manis, kegagalan maupun kesuksesan pada masa

lalu. Hanya dengan cara demikian, bangsa Indonesia dapat menimba kearifan sejarah untuk menghadapi tantangan-tantangan yang menghadang pada masa kini dan menjadikannya sebagai reservoir kearifan dan pelajaran kehidupan. Hal demikian ini dirasa sangat vital sebagai bekal dan sarana untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah dibangun dengan pengorbanan besar dari para pejuang, bukan hanya dalam bentuk harta benda, melainkan juga berupa tetesan darah, keringat dan air mata bahkan hingga merengang nyawa.

Lingkup dan Permasalahan

Lingkup kajian ini meliputi Palembang sebagai sebuah satuan politik maupun sosio-kultural. Sebagai satuan politik Palembang dimaknai sebagai pusat kekuasaan dan wilayah pengaruhnya dengan Kerajaan Sriwijaya sebagai akar sejarahnya hingga masa Kesultanan Palembang Darussalam. Penghapusan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1824 oleh Pemerintah kolonial Belanda membuat keberadaan Palembang sebagai entitas politik yang otonom berakhir. Akan tetapi, sebagai sebuah satuan sosio-kultural, eksistensi Palembang tidak berakhir, melainkan terus berlangsung karena melekat dengan keberadaan masyarakat Palembang sendiri.

Fokus utama kajian terutama adalah Kesultanan Palembang Darussalam dan warisan sosio-kultural yang dipahatkannya pada masyarakat Palembang yang masih berlangsung hingga saat ini. Secara khusus kajian tentang sejarah dan budaya Palembang ini dimaksudkan terutama untuk mendokumentasikan keberadaan dan peranan Kesultanan Palembang dalam konteks perkembangan sejarah Indonesia. Pokok permasalahan

yang hendak dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang historis Kesultanan Palembang Darussalam?
2. Bagaimana tahap-tahap perkembangan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pusat kekuasaan politik Islam sejak masa pendirian hingga penghapusannya?
3. Seperti apakah struktur pemerintahan dan masyarakat Kesultanan Palembang, serta karakternya?
4. Bagaimana kehidupan perekonomian Palembang pada masa kesultanan sehingga menarik bangsa-bangsa lain untuk menguasainya?
5. Mengapa Kesultanan Palembang sulit ditaklukan oleh kekuatan imperialis Barat khususnya Belanda? Bagaimana sistem pertahanan dan keamanan kesultanan dibangun?
6. Warisan apakah yang ditinggalkan Kesultanan Palembang Darussalam baik dari segi bangunan maupun nilai-nilai budaya?
7. Bagaimana karakter masyarakat Palembang hadir dalam bentuk ekspresi seni dan budaya?

Pendokumentasian ini dilakukan dengan tujuan agar sejarah Kesultanan Palembang dan warisan sosio-kulturalnya dapat diketahui secara lebih luas dan tidak terhapus dari memori kolektif bangsa. Tujuan lainnya adalah untuk memaparkan kisah bangkit, perkembangan, dan keruntuhan Kesultanan Palembang Darussalam. Kisah demikian akan memberi inspirasi dan kearifan sejarah tentang bagaimana membangun bangsa dan menghindarkannya dari keruntuhan. Sejarah diakui merupakan sumber yang sangat berharga untuk mendapatkan kearifan (*wisdoms*) sebagai bekal mengarungi kehidupan karena menyediakan sarana belajar dan bercermin tentang kesuksesan dan kegagalan dari bangsa, negara, dan masyarakat pada masa lalu. Dengan cara demikian, kegagalan serupa dapat dihindari,

demikian pula kesuksesan dari masa lalu dapat ditiru dan diulangi melalui pembelajaran tentang strategi dan cara untuk mencapainya.

Metode

Penelitian tentang sejarah dan budaya dengan fokus Kesultanan Palembang Darussalam digarap dengan menggunakan metode sejarah karena subyek yang diteliti termasuk dalam wilayah kajian sejarah. Pintu masuk untuk membangun narasi dan penjelasan historiografis adalah sumber-sumber sejarah yang ditinggalkan dari masa lalu mengenai Palembang. Oleh karena itu, tahapan kerja penggarapan tulisan ini secara umum meliputi empat langkah pokok atau prosedur kerja dalam penelitian sejarah. Seperti dikemukakan Louis Gottschalk (1985), Metode sejarah pada dasarnya meliputi empat tahapan kerja, yaitu: 1) heuristik, yakni tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan penulisan subjek garap; 2) kritik sumber, yakni perlakuan secara kritis atas sumber-sumber yang terkumpul untuk menentukan otentisitas atau yang biasa disebut kritik eksternal, serta perlakuan secara kritis terhadap informasi sejarah untuk menentukan kredibilitasnya sehingga diperoleh informasi yang kredibel/dapat dipercaya sebagai fakta-fakta sejarah (kritik internal); 3) interpretasi, yakni mentransformasikan fakta-fakta sejarah untuk menyusun argumentasi historis, dan 4) historiografi, yakni penuangan argumentasi yang dibangun dalam wujud narasi atau konstruksi sejarah (Gottschalk, 1985). Model penulisan narasi mengambil bentuk deskriptif-analitis.

Data yang dihimpun dan dirujuk dalam penulisan ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang relevan untuk dijadikan bahan konsultasi dalam konteks penelitian ini adalah

tulisan-tulisan dari pelaku dan saksi sejarah, di antaranya karya Van Sevenhoven, pejabat Belanda yang bertugas di Palembang, dan reportase Tome Pires dalam karya *Suma Oriental*, serta laporan-laporan dan terbitan sezaman. Arsip-arsip yang dikumpulkan juga meliputi arsip tekstual (konvensional) berupa naskah teks terbitan Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel-artikel, laporan-laporan hasil penelitian baik yang terpublikasi maupun belum, serta bahan-bahan lain yang relevan dengan subyek yang diteliti. Bahan-bahan material sebagai sumber sejarah tersebut, dikumpulkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Sumatra Selatan (Palembang), Kantor Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II di Kompleks Benteng Kuto Besak. Setelah data sekunder terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis dokumen (*documentary analysis*) sebagai sarana untuk mengungkap informasi yang termuat dalam dokumen, laporan-laporan resmi, buku-buku mengenai berbagai aspek terkait sejarah Kesultanan Palembang yang dijadikan fokus penelitian.

Guna memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, maka dilakukan observasi ke lapangan. Observasi dilakukan dengan mengunjungi situs-situs bersejarah yang ditinggalkan Kesultanan Palembang Darussalam khususnya dalam kompleks bangunan kraton (benteng) dan makam kesultanan. Di samping itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pewaris dan pelaku budaya Palembang untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan dalam dokumen-dokumen sehingga perlu digali dengan cara lain. Wawancara dilakukan secara bebas dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk dijadikan pegangan. Hal

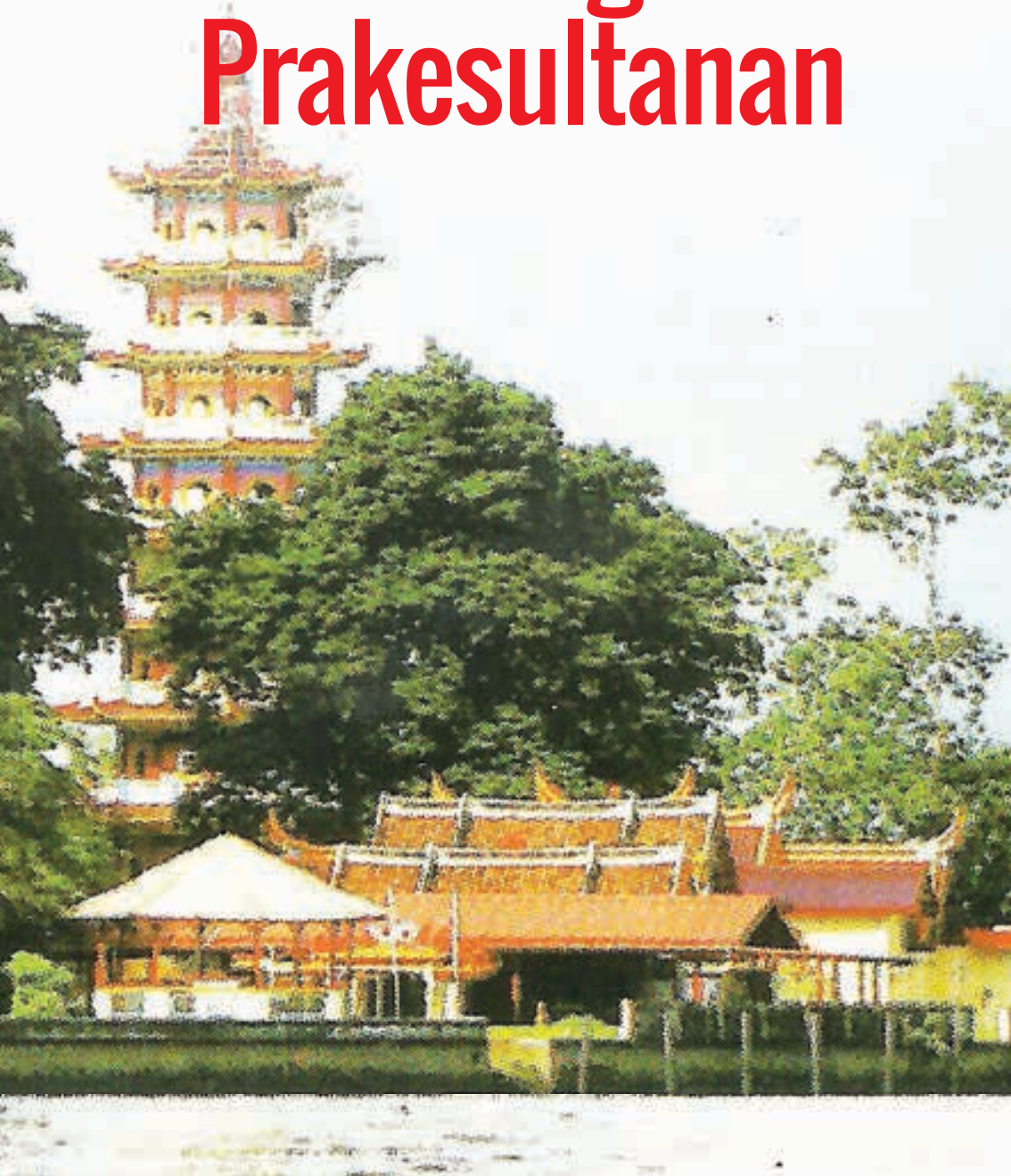
ini untuk memberikan kesempatan yang luas kepada responden yang diwawancarai untuk memberikan jawaban secara panjang lebar. Dengan melakukan wawancara didapatkan sumber pembanding dan sekaligus sebagai sumber pelengkap untuk memperkaya sumber-sumber tertulis.

Organisasi penulisan

Buku ini terdiri atas tujuh bab. Setelah uraian pendahuluan yang tersaji dalam Bab 1, disusul Bab 2 yang memaparkan fondasi sejarah wilayah Kesultanan Palembang dengan fokus Kerajaan Sriwijaya dan Suwarnabhumi. Pada Bab 3 disajikan bahasan tentang Kesultanan Palembang sebagai pusat kekuasaan politik dengan menyajikan fase-fase perkembangannya sejak masa pembentukan hingga masa keruntuhannya. Bab 4 berisi uraian tentang struktur pemerintahan dan masyarakat Kesultanan Palembang Darussalam. Pada Bab 5 disajikan bahasan tentang kehidupan ekonomi pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dengan perhatian khusus pada pertanian, perdagangan dan pertambangan. Bab 6 menyajikan ulasan tentang sistem pertahanan dan keamanan kesultanan untuk memahami kekuatan dan kelemahannya. Bab 7 berisi bahasan mengenai bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi bukti eksistensi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebagian bangunan-bangunan ini masih hadir hingga dewasa ini dan merepresentasikan kekhasan Palembang. Pada bab 8 sebagai uraian penutup disajikan bahasan seni dan budaya masyarakat Palembang dengan fokus khusus pada busana, kuliner, adat-istiadat, dan seni tari.

Bab 2

Palembang Masa Prakesultanan



Palembang merupakan salah satu kawasan di wilayah Nusantara yang secara historis memainkan peranan yang sangat penting. Kawasan ini memperlihatkan perkembangan sejarah yang sangat panjang dan menjadi tempat munculnya salah satu pusat peradaban besar dan tua di Nusantara. Sebelum terbentuknya Kesultanan Palembang Darussalam, di kawasan ini telah muncul kerajaan besar yang mempengaruhi jalannya sejarah di kawasan Asia Tenggara, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Suwarnabhumi. Kedua kerajaan bukan hanya memainkan peran penting dalam sejarah politik di kawasan ini, melainkan juga dalam bidang pelayaran dan perdagangan yang melibatkan kaum dagang dari berbagai bangsa.

Kerajaan Sriwijaya

Pada masa kejayaannya yang berlangsung pada abad ke-7 hingga abad ke-9, Kerajaan Sriwijaya digambarkan sebagai salah satu kerajaan maritim terpenting di Asia Tenggara (Zed, 2003:4). Berbagai peninggalan sejarah telah memberi bukti tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Setidaknya telah ditemukan sepuluh prasasti peninggalan Sriwijaya, yakni Prasasti Kedukan Bukit di Palembang, Prasasti Talang Tua di Palembang, Prasasti Kota Kapur di Sebelah Barat Pulau Bangka, Prasasti Karang Birahi di Jambi, Prasasti Palas Pasemah di Lampung, Prasasti Boom Baru di Palembang, Prasasti Tulang Bawang, Prasasti Bungkuk, dan Prasasti Ligor di Semenanjung Malaya (Mahmud, 2008:20). Temuan-temuan arkeologis yang didapatkan para ahli sejarah kuno seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Talang Tuwo, Prasasti Karang Brahi dan Prasasti Kota Kapur mengantarkan pada keyakinan kuat bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berlokasi di pantai timur Sumatera Selatan

atau wilayah Palembang sekarang ini (Muljana, 1981:65-66).

Pada masa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang besar dan makmur. Kebesaran dan kemakmuran Sriwijaya tergambar jelas dalam kesaksian seorang penulis Arab, Ibnu Rustah, yang menyatakan: “tidak ada negara yang sekaya dan lebih berkuasa serta mendapat upeti dari mana-mana selain Sriwijaya” (Mahmud, 2008:14). Seorang penulis Cina yang lama tinggal di Sriwijaya, I-Tsing menggambarkan Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ketujuh menikmati kemakmuran yang sangat tinggi. “Rakyat memberikan sajian bunga teratai emas kepada arca Budha; dalam upacara agama tampak perabotan dan arca-arca serba emas. Rakyat dari semua lapisan berlomba memberi sedekah kepada para pendeta” (Muljana, 1981:81). Ibukota Sriwijaya, Palembang, digambarkan sebagai sebuah kota yang sangat kaya, menjadi pusat imperium komersial yang menguasai kawasan Nusantara (Furnivall, 1967:2).

Kebesaran Palembang pada masa Kerajaan Sriwijaya tidak terlepas dari peranan yang dimainkannya dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang politik, misalnya, Kerajaan Sriwijaya mempunyai wilayah pengaruh yang sangat luas. Pada masa kejayaannya, wilayah Kerajaan Sriwijaya meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Semenanjung Malaka hingga Thailand Selatan (Supriyanto, 2013:1-2). Luasnya wilayah kekuasaan sekaligus menjadi sumber pemasukan ekonomi yang sangat penting bagi istana. Sebagai pusat kekuasaan, secara rutin Sriwijaya menerima upeti yang wajib dikirimkan oleh negara-negara bawahannya dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Terdapat beraneka ragam upeti yang diserahkan, misalnya dalam bentuk hasil bumi, perak, emas, dan barang-barang berharga lainnya. Dari negara-negara bawahan di pantai timur Semenanjung Malaka, misalnya, penguasa Sriwijaya mendapat upeti berupa emas, perak dan barang-barang porselin. Kiriman-kiriman upeti setiap tahun membuat penguasa Sriwijaya menjadi

Bab 3

Kesultanan Palembang Darussalam



Masa Pembentukan

Asal usul nama Palembang mempunyai beberapa versi. Salah satu versi mengaitkan Palembang dengan kata dalam bahasa Jawa, *limbang*, yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lain. Pemisahan dilakukan dengan bantuan alat berupa keranjang kecil untuk mengayak tanah ber kandungan logam atau biji di aliran sungai. *Pa* adalah kata depan yang dipakai orang Jawa untuk menunjuk suatu tempat berlangsungnya usaha atau keadaan. Versi ini terkait erat dengan peran Palembang pada masa lalu sebagai tempat mencuci emas dan biji timah. Versi lain menghubungkan Palembang dengan kata *lemba*, yang berarti tanah yang dihanyutkan air ke tepi (Van Sevenhoven, 1971:12). Kedua versi ini secara jelas mengindikasikan pentingnya air sebagai elemen lanskap lingkungan Palembang.

Hal tersebut tidaklah terlalu berlebihan karena dalam berbagai sumber sejarah, Palembang sering dilukiskan sebagai tempat yang banyak airnya. Dengan kondisi demikian, tanah kering lebih sulit untuk dijumpai. Dalam penggambarannya tentang Sumatera, seorang penulis Inggris, William Marsden, menuliskan bahwa Palembang berada di dataran yang banyak dijumpai rawa-rawa, dengan letak beberapa mil di atas delta sungai. Dituliskan pula lebih jauh:

“Palembang selalu digenangi air sungai, terutama ketika air pasang sehingga tak memungkinkan untuk membangun jalan.... Hampir seluruh perhubungan dilakukan dengan perahu. Perahu-perahu yang berjumlah ratusan meluncur di sungai ke segala penjuru” (Marsden, 2008:333).

berupa pengiriman ekspedisi-ekspedisi militer kerajaan Jawa ke Palembang. Ekspedisi militer berlangsung berulang-kali, misalnya terjadi pada tahun 1275 pada masa Kertanegara berkuasa di Singasari, tahun 1350 dan 1397 pada masa Kerajaan Majapahit (Hanafiah, 1995:113).

Pada masa akhir Kerajaan Majapahit, penguasaan wilayah Palembang berada di tangan Ario Dillah atau yang juga sering disebut dengan nama Ario Damar (1455-1486). Dia adalah salah seorang keturunan Prabu Brawijaya V yang bertahta di Majapahit. Ario Dillah dengan demikian bertindak sebagai wakil penguasa Majapahit di Palembang. Ario Dillah mendapat hadiah Putri Champa, istri Prabu Brawijaya yang menganut Islam. Pada saat dihadiahkan kepada Ario Dillah, Putri tengah dalam keadaan hamil. Anak tersebut setelah lahir dinamai Raden Fatah, yang nantinya menjadi pendiri Kesultanan Demak (Hanafiah, 1996:3-5).

Setelah melewati masa kecil di Palembang, tatkala menanjak dewasa Raden Fatah pergi ke Majapahit bersama dengan Raden Kusen, saudaranya. Keduanya lantas membuka pemukiman di Desa Bintoro, yang menjadi cikal-bakal Kesultanan Demak. Atas dukungan Sunan Ampel, yang juga mertuanya, Raden Fatah mengangkat diri sebagai Sultan Demak. Kekuatan militer Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa terus tumbuh dengan pesat sehingga akhirnya mampu menaklukkan Kerajaan Majapahit. Dengan dimasukkannya Majapahit di bawah kekuasaan Kesultanan Demak, Raden Fatah kemudian bergelar Senopati Jimbun Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panata Gama. Gelar ini sekaligus menegaskan betapa pentingnya Palembang bagi penguasa Demak yang pertama itu. Sebagai wakil Kesultanan Demak di Palembang adalah Pati Unus, anak sultan sendiri. Dia dikirim ke Palembang pada tahun 1528 untuk menggantikan Ario Dillah yang meninggal dunia (Mahmud, 2007:35-36).

Palembang pada paruh pertama abad ke-16 dilukiskan oleh Tome Pires, seorang petualang dari Portugis, sebagai negeri terbaik bawahan Demak. Palembang mempunyai hubungan perdagangan dengan Malaka, dengan transaksi jual-beli berskala besar dengan Pahang. Palembang mempunyai jung dan kargo dalam jumlah besar. Setiap tahun antara sepuluh hingga dua belas jung tiba di Malaka, penuh dengan muatan beras dan sayur-mayur. Komoditas dagang lain juga banyak dimuat, seperti misalnya kapas, rotan, emas, besi, lilin, madu, daging, serta bawang merah dan bawang putih dalam jumlah yang sangat besar, bahkan juga kemenyan hitam (Pires, 2015:219-220).

Kemelut perebutan kekuasaan di Demak antara Hadiwijaya dan Arya Penangsang berakhir dengan kemenangan Hadiwijaya. Setelah memenangkan perebutan kekuasaan, Hadiwijaya kemudian mendirikan Kerajaan Pajang. Sebagian pengikut Arya Penangsang yang tidak mau menyerah memutuskan untuk menyingkir ke Palembang di bawah pimpinan Ki Gede ing Suro, yang kemudian menjadi penguasa Palembang dari tahun 1587 hingga 1604. Dia digantikan oleh Ki Mas Dipati, yang memerintah Palembang pada kurun waktu 1604-1609 (Hanafiah, 1995:138, 147). Pada periode 1609-1627 Kesultanan Palembang diperintah oleh Made ing Suko (1609-1627), yang diteruskan oleh pemerintahan Pangeran Madi Alit (1627-1629), Pangeran Seda ing Pura (1629-1636), Pangeran Seda ing Kenayan (1636-1650), serta Ratu Sinuhun atau Pangeran Seda Ing Pasarean (1651-1552), dan Pangeran Seda ing Rejek (1652-1659) (Hanafiah, 1995:147). Berikut ini nama-nama para penguasa Palembang dari masa akhir Majapahit dan selama masa Kesultanan Palembang Darussalam.

Bab 4

Struktur Pemerintahan dan Masyarakat



Struktur Pemerintahan

Secara geografis wilayah Kesultanan Palembang meliputi daerah Batanghari Sembilan ditambah dengan daerah yang disebut Negeri Luar. Daerah Batanghari Sembilan meliputi daerah sembilan sungai utama di kawasan ini yang bermuara di Sungai Musi. Kesembilan sungai utama yang dimaksud adalah Sungai Banyuasin, Kikim, Kelingi, Lakitan, Lintang, Rawas, Lematang, Ogan dan Komering. Sementara itu, daerah Negeri Luar secara khusus merujuk pada Pulau Bangka dan Belitung (Rahim, 1998:11).

Dari sudut administrasi pemerintahan, wilayah Kesultanan Palembang Darussalam dibagi menjadi empat kawasan. Kawasan pertama adalah ibukota dengan istana atau keraton sebagai inti kesultanan. Di luar ibukota dikenal adanya tiga kawasan yang berbeda, yakni daerah *sikap*, daerah *kepungutan*, dan daerah *sindang* (Rahim, 1998:66). Keraton sebagai tempat kediaman sultan merupakan pusat pemerintahan ibukota. Sementara itu, daerah di luar ibukota membentuk struktur pemerintahan dengan pola yang berbeda. Secara sederhana dapat dibedakan antara pemerintahan untuk wilayah uluan dan wilayah iliran (Zed, 2003:34-35). Pusat kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam terletak di kawasan iliran dan penduduknya adalah kawula istana. Sementara itu, melewati kawasan *iliran* adalah wilayah *uluan* dan di kawasan ini orang-orang asing non-kawula bermukim (Hanafiah, 2008:27).

Ibukota Kesultanan Palembang Darussalam terletak di tepian Sungai Musi, sekitar 15 mil dari muara Sungang dan satu mil dari tempat menyatunya Sungai Ogan dan Sungai Komering dengan Musi. Mengingat ketiga sungai merupakan akses masuk ke daerah pedalaman, ibukota Palembang memiliki letak yang sangat strategis dalam kaitan dengan pengawasan

lalu lintas antara daerah luar dan pedalaman Palembang (Van Sevenhoven, 1971:13). Dua bangunan keraton utama mewakili eksistensi Kesultanan Palembang pada masa yang berbeda, yakni Keraton Lama atau Kuta Gawang dan Keraton Baru atau Kuto Besak. Bangunan keraton yang baru mempunyai ukuran lebih besar dan dikelilingi dengan tembok batu yang kuat (Hanafiah, 1989:6-12).

Di dekat keraton terdapat bangunan-bangunan rumah terbuat dari kayu, dikombinasikan dengan batu bata dan atap genting yang menjadi tempat tinggal para pangeran golongan rendah dan para pejabat istana. Di kedua tepian Sungai Musi dijumpai rumah-rumah rakit terbuat dari kayu dan bambu sebagai tempat tinggal penduduk ibukota, baik orang-orang pribumi maupun orang-orang asing seperti Cina, Arab, Eropa dan lainnya (Van Sevenhoven, 1971:14-15).

Dalam menjalankan pemerintahan kesultanan, sultan dibantu oleh pejabat-pejabat negara yang biasa disebut empat manca-negara, yakni Papatih (Pangeran Natadiraja), Pangeran Nata Agama, Tumenggung Karta, dan Pangeran Citra (De Roo de Faille, 1971:31-33). Papatih membantu sultan dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Papatih inilah yang mengawasi pengumpulan pendapatan kesultanan, menerima laporan semua urusan kerajaan, menyampaikan usulan terkait urusan pajak dan kerja wajib bagi sultan, menguasai alat-alat perlengkapan perang, memberikan nasehat dan pertimbangan kepada sultan terkait kebijakan yang dibuatnya. Sultan juga dibantu oleh adipati atau putera mahkota, yang memainkan peran sebagai penasihat langsung, wakil, dan pengganti sultan manakala sultan sendiri berhalangan (Van Sevenhoven, 1971:14-15).

Dalam kaitan dengan urusan di bidang keagamaan, sultan dibantu oleh Pengeran Nata Agama (penghulu), yang bertindak sebagai kepala alim-ulama. Pangeran Nata Agama menangani



Bab 5

Perekonomian



Dalam konteks masyarakat tradisional, termasuk Kesultanan Palembang, terdapat kaitan erat antara penduduk dan kemakmuran. Para penguasa kerajaan tradisional di Nusantara menjadikan penduduk sebagai sumber penting dalam mewujudkan kemakmuran. Tanpa adanya penduduk, kekayaan yang alam yang melimpah tidak ada artinya bagi para penguasa karena mereka tidak mungkin mengeksploitasi sendiri secara langsung kekayaan alam yang dimiliki. Para penguasa memerlukan penduduk bukan hanya dalam kaitan dengan suplai tenaga untuk angkatan perang demi kepentingan pertahanan dan stabilitas kekuasaan, melainkan juga sebagai sumber penting untuk angkatan kerja yang diperlukan dalam rangka mengeksploitasi beragam kekayaan alam yang dimiliki demi kepentingan penguasa. Tidak mengherankan, ekspedisi-ekspedisi militer dalam rangka penaklukan politik antar pusat-pusat kekuasaan di Nusantara pada masa lalu seringkali diikuti dengan deportasi penduduk secara besar-besaran oleh pihak pemenang.

Oleh karena itu, sebelum menyajikan kehidupan sektor perekonomian Kesultanan Palembang, kiranya perlu disajikan terlebih dahulu keadaan penduduk Palembang. Mereka inilah yang berperan sebagai penggerak utama roda perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam baik dengan terjun dalam sektor pertanian, perikanan, pengambilan hasil hutan, pertambangan, kerajinan, serta perdagangan. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran yang dimainkan penduduk Kesultanan Palembang Darussalam dengan menjadikan sebagai sumber mata pencaharian hidup mereka.

Penduduk Palembang

Peran historis Palembang yang sangat panjang, sejak masa Kerajaan Sriwijaya, Suwarnabhumi, hingga Kesultanan Palembang Darussalam, serta besarnya potensi ekonomi yang dimilikinya, merupakan faktor penting terbentuknya Palembang sebagai wilayah dengan komposisi penduduk yang sangat heterogen. Kemajemukan penduduk Palembang terlihat jelas dari kehadiran berbagai kelompok etnis yang ikut membentuk masyarakat Palembang. Terdapat kurang lebih 20 etnis dijumpai di wilayah Palembang, yang bermukim di pusat kota, pinggiran kota, pedalaman maupun Bangka dan Belitung (Supriyanto, 2013:33). Wilayah ibukota Palembang merupakan kawasan padat dengan ragam etnis yang banyak. Sebagai ilustrasi, laporan kolonial pada tahun 1825 menyebutkan bahwa ibukota Palembang berpenduduk sebesar 29.457 jiwa, diantaranya terdapat 119 keluarga Arab, 184 keluarga Cina, 3.589 keluarga pribumi yang menghuni sekitar 40 hingga 50 kampung kota (Supriyanto, 2013:37).

Kelompok pribumi yang mendiami ibukota meliputi beragam etnis. Sebagian adalah orang-orang Jawa dan keturunannya, yang telah datang pada masa-masa sebelumnya sejak era Sriwijaya. Sebagian lainnya adalah orang-orang yang berasal dari Malaka dan kawasan di sekitarnya (Supriyanto, 2013:34). Kelompok-kelompok etnis pribumi yang mendiami ibukota Palembang ini berbeda dengan kelompok-kelompok yang mendiami wilayah pedalaman, yang sering disebut sebagai penduduk asli. Mereka yang bermukim di pedalaman juga terdiri dari bermacam-macam kelompok etnis, di antaranya adalah: 1) Orang Komering (mendiami wilayah aliran Sungai Komering); 2) Orang Lampung (mendiami wilayah Sungai Mesuji); 3) Orang Ogan (mendiami wilayah sekitar Sungai

Bab 6

Pertahanan dan Keamanan



Sistem Pertahanan

Sistem pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam disusun dengan menggunakan pertimbangan strategis yang matang dan seksama. Sebagai pusat kekuasaan dengan elemen sungai yang menonjol, kesultanan menyadari pentingnya penguasaan atas jalur-jalur air. Hal ini dipandang vital untuk mendukung kegiatan perdagangan yang menjadi andalan kesultanan, baik perdagangan produk pertanian khususnya lada dan hasil hutan maupun produk tambang terutama timah dari Pulau Bangka dan Belitung. Penguasaan atas jalur-jalur air memerlukan dukungan kapal-kapal dan perahu yang memadai dan handal. Untuk memenuhi kebutuhan akan alat-alat transportasi ini baik dalam konteks pertahanan maupun perdagangan, Kesultanan Palembang Darussalam mempekerjakan orang-orang Senan atau Snouw. Mereka dikenal luas sebagai pembuat perahu kesultanan yang sangat trampil (De Roo de Faille, 1971:44-45).

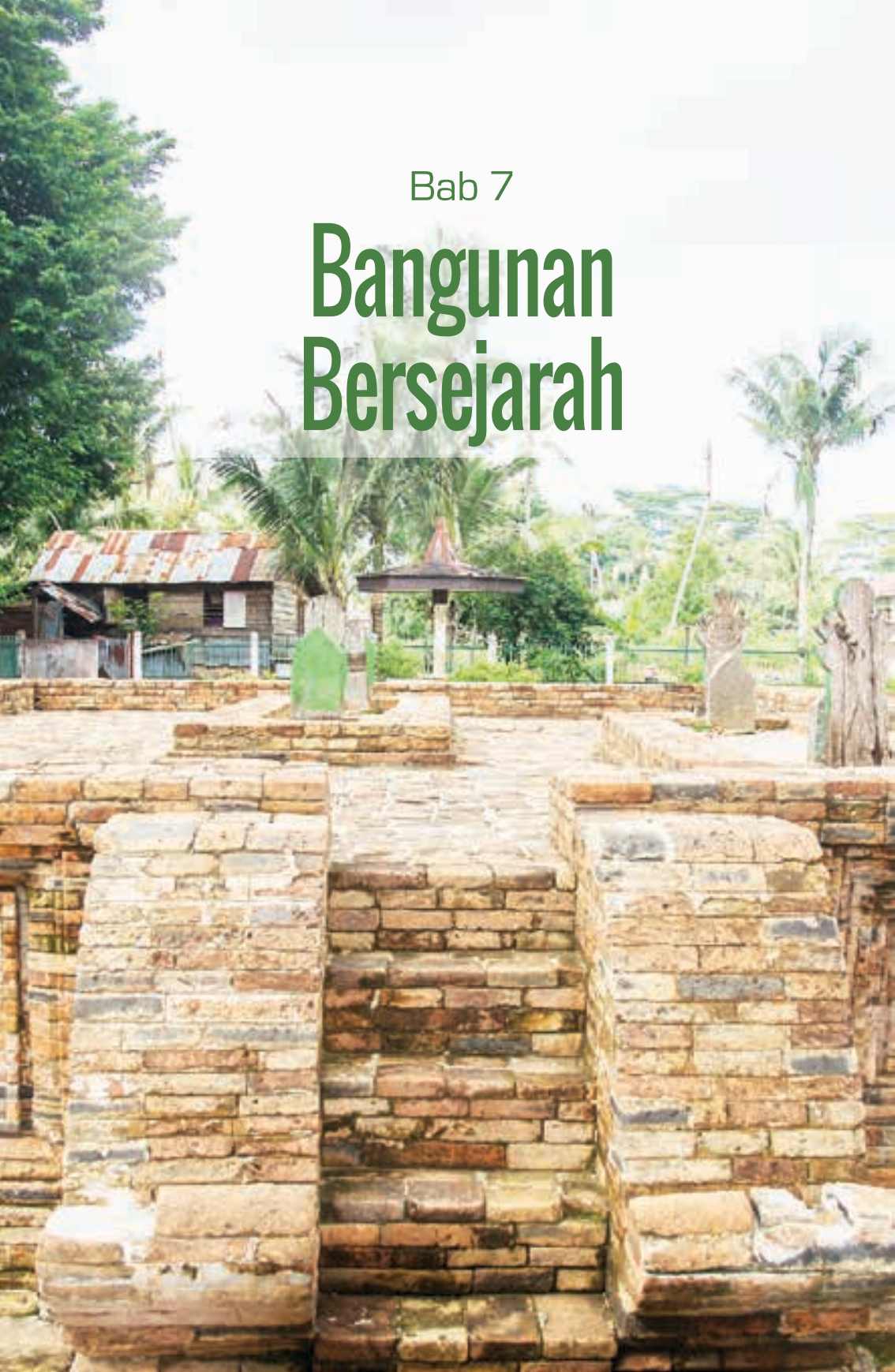
Di samping itu, kesultanan juga mempunyai kelompok dusun atau yang dikenal pula dengan sebutan "*sikap*" dengan tugas-tugas khusus untuk menopang kepentingan pertahanan. Kelompok dusun ini dibawahkan secara langsung oleh pamong sultan (Hanafiah, 1996:43) Dapat dikatakan bahwa sistem *sikap* merupakan elemen pertahanan yang alamiah dan handal sehingga kesultanan Palembang tidak mudah untuk ditaklukan oleh kekuatan lain. Dusun Muara Lakitan dan Dusun Madang, misalnya, mendapat tugas khusus mengadakan dan memelihara perahu-perahu pancalang. Tugas pemeliharaan jalur pelayaran antara Palembang dan Sunsang agar terbebas dari gangguan-gangguan dibebankan kepada Dusun Sunsang. Ada pula dusun yang dikenai kerja wajib bagi sultan sebagai pengayuh perahu-perahu maupun sebagai para penunjuk jalan atau yang secara lokal disebut *perpat* (Rahim, 1998:64).

Sejumlah sikap diberi hak penguasaan atas muara-muara sungai penting. Dusun Teluk Kijing dan Muara Danau menguasai Muara Abab, Penukal dan Batang Hari Leko, sedangkan Dusun Terusan menguasai muara Sungai Rawas, Dusun Muara Lakitan menguasai muara Sungai Lakitan, Dusun Muara Enim menguasai muara Sungai Enim, Dusun Pedamaran menguasai daerah danau-danau dan pintu masuk Lempuing di sebelah hilir Sungai Komerling (Laksana, 2013:43). Selain mendapatkan hak penguasaan, dusun-dusun tersebut juga bertugas mengawasi masuknya musuh dari luar. Dusun Belida, misalnya, diwajibkan menyediakan tenaga laskar pada waktu perang. Dalam kaitan ini, Radermacher melaporkan bahwa dalam situasi darurat para pimpinan daerah mempunyai kewajiban menyediakan sebagian bawahan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk dimobilisasi demi kepentingan perang. Demikian pula, para pangeran dan pembesar kesultanan dikenai kewajiban menyediakan sejumlah perahu untuk memperkuat armada laut dalam menghadapi situasi darurat (De Roo de Faille, 1971:38).

Dalam sistem pertahanannya, Kesultanan Palembang menerapkan sistem pertahanan semesta. Artinya, sistem pertahanan ini melibatkan rakyat Palembang di dalamnya, tidak hanya penduduk asli Palembang saja yang dilibatkan di dalamnya, melainkan juga kelompok-kelompok lain seperti Bugis, Arab dan Cina dan lainnya (Hanafiah, 1986:148). Sistem pertahanan Palembang juga mengandalkan pada penggunaan taktik perang gerilya. Taktik ini dilakukan dengan memanfaatkan elemen-elemen lingkungan alam berupa tebing, tanjung, semak dan hutan yang terdapat di sepanjang sungai-sungai yang letaknya strategis sebagai tempat untuk melakukan penyerangan terhadap kekuatan musuh. Baik pasukan kesultanan maupun laskar rakyat yang bermukim di sejumlah kelompok dusun senantiasa siap siaga dimobilisasi oleh pimpinan mereka kapanpun untuk menghadapi agresi musuh yang bermaksud

Bab 7

Bangunan Bersejarah



Palembang merupakan kota dengan kondisi geografis yang memberikan peluang bagi masuknya kebudayaan asing, seperti Cina, India, Arab, dan Eropa melalui kegiatan perniagaan dan kolonialisasi. Kebudayaan asing yang datang tersebut memberikan akulturasi, baik dari aspek interior maupun eksterior bangunan yang saling mengisi satu sama lainnya. Proses akulturasi adalah suatu proses interaktif dan berkesinambungan yang berkembang melalui komunikasi para pendatang dengan lingkungan sosio-budaya yang baru. Salah satu bentuk komunikasi dalam sebuah akulturasi budaya dapat dilihat pada hasil peninggalan berupa artefak, baik berupa karya seni rupa maupun seni arsitektur. Palembang merupakan salah satu wilayah yang memiliki berbagai bangunan dengan akulturasi dari beberapa kebudayaan tersebut. Bangunan-bangunan yang khas dengan akulturasi dari berbagai kebudayaan di Palembang, antara lain Masjid Agung Palembang, makam raja-raja Palembang, dan rumah limas.

Masjid

Pada masa Kesultanan Palembang, agama Islam menjadi agama resmi kerajaan. Oleh karena itu, masjid sebagai tempat ibadah umat Islam banyak dibangun pada masa tersebut. Masjid-masjid tersebut antara lain: Masjid Agung Palembang, Masjid Merogan, dan Masjid Suro.

Masjid Agung Palembang

Masjid Agung Palembang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama bin Sultan Muhammad Mansyur Jaya Ing Laga atau dikenal dengan nama Sultan Mahmud Badaruddin I yang memerintah tahun 1724-1750. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 15 September 1738.

Selanjutnya, Masjid Agung Palembang diresmikan pada hari Senin tanggal 26 Mei 1748. Masjid Agung Palembang dikenal dengan nama Masjid Sultan (Arsip YKPD, 2002; Hanafiah, 1988:14; Heritage, TT).

Masjid Agung Palembang, sebenarnya bukanlah masjid pertama di kota Palembang. Hal ini dibuktikan dengan laporan kepala pengusaha (*opper koopman*) VOC di Palembang, Jonathan Claessen tanggal 30 Juni 1663 yang menyatakan bahwa dia tidak mendapatkan kuli untuk membangun Loji Sungai Alur karena penduduk Palembang sedang membangun sebuah masjid. Jika dikaitkan dengan masa pemerintahan Kesultanan Palembang, maka masa ini terjadi pada saat kepemimpinan Sultan Abdurrahman yang bergelar Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam (1659-1706). Masjid ini sekarang menjadi nama sebuah jalan di Kota Palembang, yaitu Jalan Masjid Lama (Hanafiah, 1988: 7).

Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, Masjid Agung Palembang diurus oleh Pangeran Nata Agama atau penghulu yang dalam kedudukan protokoler kekeratonan, ia duduk di sebelah kanan sultan (De Roo de Faille, 1971). Dengan menyandang gelar pangeran, maka penghulu juga mempunyai tugas mengadili hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, mengawasi, dan mengatur semua kegiatan keagamaan. Kekuasaan Pangeran Nata Agama tidak hanya terbatas di pusat kerajaan, tetapi juga di daerah pedalaman yang di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya dimasukkan dalam bab ke-4 di bawah judul “aturan kaum” (Tim Peneliti Hukum Islam, 1993:65).

Pada masa Sultan Ahmad Najamuddin dan Sultan Badaruddin II, kehidupan agama Islam di Palembang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini terjadi karena keduanya merupakan orang-orang yang taat beragama dan selalu memberi contoh dengan menjadi imam sholat di Masjid

Bab 8

Seni dan Budaya Palembang



Kota Palembang menyimpan banyak kisah sejarah. Hal ini terbukti dengan banyaknya bangunan tradisional dan peninggalan budaya Kerajaan Palembang. Letak Palembang yang sangat strategis, menjadikannya sebagai pusat perdagangan internasional, sehingga tidak mengherankan jika Palembang pernah menjadi kerajaan besar dan berjaya di bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Di dalam perjalanan sejarah pembentukan kebudayaan Palembang, pada hakekatnya masyarakat Palembang mengalami proses kreatif yang menghadirkan sosok sintesis budaya baru sebagai akibat pertemuannya dengan kebudayaan asing. Dengan demikian, sosok budaya Palembang sekarang ini terbentuk dalam rentang waktu yang panjang dan rumit.

Berdasarkan sumber sejarah Melayu, cerita tutur Palembang, maupun sumber kolonial diketahui bahwa budaya Palembang mempunyai “keunikan”. Lingkaran budaya lokal genius dengan budaya asing (Hindu/Budha dan Islam) tercermin dalam kehidupan di lingkungan keraton dan masyarakat Palembang. Unsur-unsur sosio-budaya tersebut, tersebar di berbagai aspek kehidupan, antara lain: busana/pakaian (*fashion*), makanan (kuliner), bahasa, sastra, seni tari, dan sebagainya.

Busana (Fashion)

Sejak zaman neolithikum, bangsa Indonesia sudah mengenal cara membuat busana/pakaian. Dari alat-alat peninggalan zaman neolithikum tersebut, dapat diketahui bahwa kulit kayu merupakan pakaian manusia pada zaman prasejarah di Indonesia. Alat yang digunakan adalah alat pemukul kulit kayu yang dibuat dari batu. Di samping pakaian dari kulit kayu, dikenal juga bahan pakaian dengan menggunakan kulit binatang yang pada

umumnya dipakai oleh laki-laki sebagai pakaian untuk upacara ataupun pakaian untuk perang. Sejak zaman prasejarah, nenek moyang bangsa Indonesia juga sudah mengenal teknik menenun. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penemuan tembikar dari zaman prasejarah yang di dalamnya terdapat bentuk hiasan yang terbuat dari kain tenun kasar.

Penggalian arkeologis telah membuktikan bahwa pada sekitar abad 8-9 SM, telah dikenal istilah orang-orang yang memperdagangkan kisi, benang (*atukel*), mencelup dengan warna biru dan merah (*mangnila wungkudu*), menjual kapur (*manghupu*) yang banyak dipergunakan dalam campuran warna pembuatan kain (*padwihan*). Informasi tersebut, merupakan aktifitas yang mempunyai nilai ekonomi sosial yang tinggi. Sebab, selain untuk menambah penghasilan juga untuk persembahan kepada orang yang dihormati. Di dalam catatan musyafir Cina tahun 518 M disebutkan bahwa raja dari bagian utara Sumatra sudah memakai pakaian sutera dari Cina. Pada zaman Sriwijaya, di Sumatra dan di Jawa juga telah dikenal adanya kain patola sutera, serta bahan-bahan seperti benang dan sutera yang berasal dari pedagang Cina. Benang sutera kemudian dapat diproduksi sendiri oleh masyarakat Palembang sejak abad ke-15 karena untuk pertama kalinya masyarakat Palembang berhasil menanam pohon murbei dan menjinakkan ulat sutera. Bersamaan dengan itu, muncul pula kain tenun yang terbuat dari benang kapas di Sumatra, Jawa, dan Bali (Rohanah, dkk, 2009: 23-25).

Busana Palembang, berkembang seiring dengan lahirnya industri kerajinan tenun rakyat pada masa Kerajaan Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya yang strategis dan penghasil lada terbesar di Sumatra, menarik minat para pedagang dari Cina dan India. Oleh sebab itu, perkembangan tekstil di Palembang, baik teknologi, ragam hias, maupun corak warnanya sangat dipengaruhi sentuhan kebudayaan Cina dan India. Keadaan ini berlangsung sampai abad ke-15, dimana saat itu pula Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip, Buku, Artikel, Brosur dan Bahan Tercetak
Arsip YKPD (Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam).
- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Akib, dkk, *Sejarah dan Kebudayaan Palembang Jilid I*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
- Arif, dkk, *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Palembang* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1981).
- Coedes, George. *Sriwijaya: History, religion & language of an early Malay polity: collected studies*. London: Monograph of the Malaysian Branch, Royal Asiatic Society, 1992.
- Cortesao, Armando (ed.). *Suma Oriental Karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Court, M.H. *An Exposition of Relations of the British Gouvernement with the Sultan and State of Palembang and the Design of the Netherlands Gouvernement upon the Country*. London: Parbury and Allen, 1821.
- Data dan Informasi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan*. Jakarta: Direktorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial RI, 1987.
- De Roo de Faille, F. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Djakarta: Bhratara, 1971.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dinas Budpar. "Kota Wisata Sungai: Masjid Ki Marogan", *Buku*

Saku. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang, TT.

Dokumen Kesultanan Palembang Darussalam, *Peninggalan-Peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang; 27 Oktober 2002.

Farida. "Perekonomian Kesultanan Palembang", *Jurnal Sejarah Lontar*, Volume 6 No.1 (Januari-Juni) 2009, hlm. 12-20.

Farida, "Perang Palembang dan Benteng-Benteng Pertahanannya 1819-1812", Makalah pada Seminar Nasional Palembang Masa Lalu, Kini dan Masa Depan. 2012a.

Farida, "Konflik Kepemimpinan di Kesultanan Palembang", *Makalah*, pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Indepemda Sumatera Selatan, di RRI Sumsel, 22 Oktober 2012b.

Furnivall, J.S. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1967.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.

Hanafiah, Djohan dan Nanag S. Soetadji, "Jipang, Tempat Asal Pendiri Kesultanan Palembang-Sebuah Laporan perjalanan", dalam Djohan Hanafiah (ed). *Perang Palembang Melawan VOC*. Palembang: Pemerintah Daerah Kotamadya Palembang, 1996.

Hanafiah, Djohan, "The Chinese Occupation in Palembang", Bambang Budi Utomo (ed), *Cheng Ho: His Cultural Diplomacy in Palembang*. Palembang: Government of South Sumatera Province, 2008.

Hanafiah, Djohan. "Kesultanan Palembang Darusalam dalam Perspektip Sumatera Selatan, dalam Djohan Hanafiah (ed.), *Perang Palembang Melawan VOC*. Palembang:

- Reformasi*. Padang: BPSNT Padang Press, 2010.
- Larson, George D. *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Mahmud, Kiagus Imran. *Sejarah Palembang*. Palembang: Penerbit Anggrek, 2008.
- Mardiwarsito, L. *Kamus Jawa Kuno – Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1986.
- Marsden, William. *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962.
- Moertono, Soemarsaid. *Negara dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau*. Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- Muljana, Slamet. *Kuntala, Sriwijaya, dan Suwarnabhumi*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
- Nato Dirajo, Husin. “Riwayat Hidup Sultan Mahmud Badarrudin II”. Palembang: 1984.
- Nawiyanto, Eko Crys Endrayadi, dan Siti Sumardiati, *Melacak Jejak Pejuang: Biografi R.H. Noerdhin Soetawidjaja*. Yogyakarta: Galang Press, 2015.
- “Palembang Arts and Culture”. *Brosur*. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang, TT.
- Pemprov Sumsel. *City Guide: South Sumatera Highlight*. Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2011.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Gelar Kebangsaan Kaitannya dengan Rumah Limas Palembang*. Palembang: TP, 2006.

GLOSARIUM

Adat	: Tradisi dan kebudayaan lokal
Aesan gandek	: Pakaian selendang menteri
Aesan gedeh	Pakaian ksatria
Alingan	: Pembantu miji dalam melaksanakan tanggung-jawab yang diserahkan kepadanya
ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
Bebaso	: Bahasa Palembang halus, yang dibedakan dengan bahasa Palembang sari-sari (sehari-hari)
Depati	: Raja-raja kecil di pedalaman atau kepala-kepala rakyat yang bebas
Dusun	: Desa, unit organisasi sosial/pemerintahan tingkat paling bawah zaman kesultanan
Heuristik	: Pengumpulan sumber sejarah
Historiografi	: Penulisan sejarah
Iilir	: Bagian hilir sungai atau daerah dataran rendah
Jenang	: Pejabat pemerintahan pusat yang diberi hak penguasaan atas dusun atau marga
Kepungutan	: Daerah kekuasaan Kesultanan Palembang
Krio	: Kepala dusun di Palembang
Ladang	: Tanah pertanian
Lela	: Meriam ukuran kecil
Marga	: Unit pemerintahan supralokal di Palembang, terdiri dari 2-15 dusun
Matagawe	: Orang kebanyakan pada masa Kesultanan Palembang
Merogan	: Muara Ogan
Miji	: Sekelompok orang yang disertai tanggung-jawab melakukan berbagai pekerjaan tangan untuk sultan dan para priyayi

Pancalang lima	: Lembaga pemerintahan di Palembang yang terdiri dari lima pembesar tinggi kerajaan/kesultanan
Paseban	: Balai tempat menghadap sultan/raja
Pasirah	: Kepala marga, sering pula disebut Depati
Pencalang	: Perahu kecil terbuat dari papan
Pengalasan	: Prajurit atau hulu balang sultan
Penghulu	: Pejabat agama zaman Kesultanan Palembang
Perpat	: Penunjuk jalan
Pikul	: Ukuran berat, 1 pikul = 62,5 kilogram
PNRI	: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Priyayi	: Orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan sultan
Proatin	: Kepala-kepala dusun dan para pembantunya yang dibawahkan oleh depati
Raban	: Pejabat pemerintahan pusat yang diberi hak penguasaan atas dusun atau marga
Raden	: Gelar bangsawan Palembang
Rumah limas	: Rumah tradisional para pejmbesar Kesultanan Palembang, belakangan juga disebut
Sikap	: Kelompok dusun yang mendapatkan tugas-tugas khusus dari kesultanan
Simbur Cahaya	: Undang-Undang Kesultanan Palembang yang disusun oleh Ratu Sinuhun, yang dikompilasi dan dikodifikasi pada masa kolonial Belanda
Sindang	: Daerah otonom zaman kesultanan Palembang
tiban tukon	: Barang-barang yang dikirim ke pedalaman
Uluan	: Daerah hulu sungai atau daerah dataran tinggi
YKPD	: Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam

INDEKS

A

- Abdurrahman, Sultan, 35-36, 38, 101, 112, 147
Adat, x, 51, 53, 57-58, 135, 145, 147, 151-153, 156-157, 160, 163
Aesan: - Gandek; - Gede, 152-153, 170
Akib, 44, 133-136, 138, 144, 147, 149-152, 154, 157-158
Alingan, 58
Anom, Sultan Ahmad Najamuddin Prabu, 43, 126
Arab, 6, 16, 37, 50, 55, 62, 70-71, 78, 88, 111, 124-125, 132, 137, 143-144, 158, 161-163

B

- Badaruddin II, Sultan Mahmud, xiii, 5, 10, 32, 39-45, 61-66, 89-90, 93, 98-99, 102, 105, 107, 112, 119, 123, 131-132, 148-149, 151, 160-162, 164, 168
Bahasa, x, 20-21, 27, 120, 125, 135, 141, 162-165
- Jawa, 27, 120, 162, 164
- Melayu, 20, 164
- Palembang, 135, 162, 164-165
Bahauddin, Sultan Muhammad, 37, 39, 80, 96, 117, 130, 132
Bangka, 15, 17, 36, 39, 49, 70, 75, 80, 82, 87, 89-90
Batanghari Sembilan, 49, 75
Batavia, 33, 83, 163
Bebaso, 162
Belanda, 4-8, 10, 33-36, 40, 42-46, 63-64, 66, 73, 81-83, 89-90, 92, 95, 97-100, 103-105, 107, 115,

119, 123, 128, 132, 158, 161, 164, 166, 168

- Benteng, x, 10, 23, 34, 39, 42-43, 63, 92-100, 113, 117-123, 138, 161
- Beringin Janggut; x, 35, 121-122
- Kuto Besak, 10, 38-39, 50, 94, 96-97, 100, 113, 117-120, 122-123, 138
- Kuto Gawang, 32-33, 120-122, 128, 161
- Manguntama, 43, 92, 100
Bukit Siguntang, 20
Busana, 11, 141-142, 144, 147, 150, 154, 168-169

C

- Cina, 16-23, 32, 50, 70-71, 78-79, 82, 84, 88, 90, 111, 113, 117, 142, 144, 146-147, 158, 161
Cinde Walang, 121-122

D

- Damar, Ario, 29
De la Faille, Roo, 78
Demak, 3, 23, 29-30, 65, 125
Demang, 46, 60, 81, 95, 135
- Lebar Daun, 60
Depati, 52-53

H

- Hanafiah, Johan, 5
Hindia Belanda, 44, 73, 83
Hindu, 124, 141, 168-169
Hulubalang, 51, 101, 124, 147, 151

I

- Ilihan, 49, 52

India, 18-19, 21, 111, 142, 144-145, 158, 161
Indonesia, xii, xiii, 3-7, 10, 20, 37, 42, 44, 90, 115, 120, 141-142, 162, 164-165
Inggris, 5, 27, 36, 38, 41-42, 64, 66, 73-74, 78, 82, 84, 89-90, 97, 104-105, 107, 164
I-Tsing, 16

J

Jawa, 3, 16, 18, 21-23, 27-29, 36, 65, 70, 73, 76, 79, 90, 120, 142, 154, 158, 162-164
Jenang, 51-52

K

Kafir, 63-64, 164
Kembaro, 2, 34, 94-95, 99-100
Kepungutan, 49, 52
Kerajaan Sriwijaya, 3, 7, 11, 15-21, 28, 70, 127, 142-144, 154, 168-170
Keraton, 4, 32-35, 37-38, 43, 49-50, 63, 65, 72, 103, 118, 120, 122-123, 141, 158, 162-164, 170-171
Kesultanan, v, vii, viii, ix, xii, xiii, xiv, 4-11, 15, 25, 28-30, 34-39, 42, 44-45, 49-50, 54-55, 57-59, 61-66, 69-83, 87-91, 93-94, 98-99, 101-107, 111-113, 118, 120-122, 126, 128-129, 132, 144-145, 147, 149-151, 154, 157-161, 163-166, 170
- Demak, 29, 65
- Palembang, v, vii, viii, ix, xii, xiii, xiv, 4-11, 15, 25, 28, 30, 34-39, 42, 44-45, 49-50, 54-55, 57, 59, 61-66, 69-83, 87-91, 93-94, 98, 101-107, 111-113, 118, 120-122,

126, 128-129, 132, 144-145, 147, 149-151, 154, 157-161, 163-166, 170

Ki Gede ing Suro, 30, 125-126
Kolonial Belanda, 4-7, 42, 44-45, 66, 103, 115, 123, 158, 164, 166
Komerang, 46, 49, 70, 74, 88, 94, 128
Kubu, 23, 154
Kuliner, 11, 141, 155-159

M

MacDonald, Kapten, 90
Mahmud Jayo Wikramo, Sultan, 38
Majapahit, 3, 22-23, 29-30, 55, 136
Makam, 10, 38, 111, 116, 123-131, 136
Malaka, 16-19, 22, 30, 36, 39, 59, 66, 70, 90, 144, 154
Masjid, 38, 111-117, 129, 138, 158, 163, 169
Matagawe, 57-58
Mataram, 3-4, 31-32, 35-36, 55, 65-66, 105
Melayu, 6, 17, 19-20, 37, 39, 54, 141, 144, 163-165
Mesuji, 45, 70
Miji, 58
Muhammad Bahaudin, Sultan, 37, 39, 96, 117, 130, 132
Musi, 19, 28, 33-34, 49-50, 52, 71, 74-76, 78, 89, 94-96, 100, 105, 113, 117-120, 122, 125, 155

P

Pakaian, 36, 75, 102, 141-143, 145, 147-154, 168, 170-171
Palembang, xii, xiii, xiv, 3-11, 13, 15-19, 21-23, 25, 27-32, 34-40, 42-46, 49-50, 52-57, 59, 61-66, 69-84, 87-96, 98-107, 111-118,

BIODATA



Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.,

Lahir di Klaten pada tahun 1966. Saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (1990), MA dari Faculty of Asian Studies, The Australian National University (2000), doktor sejarah dari Division of Pacific and Asian History, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), The Australian National University (2007). Beberapa buku yang dihasilkan di antaranya: *Melacak Jejak Pejuang: Biografi R.H. Noerdhin Soetawidjaja* (Yogyakarta: Galang Press, 2015). *Pangan, Makan dan Ketahanan Pangan: Konsepsi Etnis Jawa dan Madura* (Yogyakarta: Galang Press, 2011), *The Rising Sun and the Bamboo Curtain: Japanese and Chinese Trade Competition in Java during the 1930s and the 1990s Crises* (Jember: Jember University Press, 2010), *Matahari Terbit dan Tirai Bambu: Persaingan Dagang Jepang –Cina di Jawa Pada Masa Krisis 1930-an dan 1990-an* (Yogyakarta: Ombak, 2010), *The Development of Plantations in Jember during the Late Colonial Period* (Bantul: Lembah Manah, 2008), *Agricultural Development in a Frontier Region of Java: Besuki, 1870 – Early 1990s, second edition.* (Yogyakarta: Galangpress, 2006), *The Rising Sun in a Javanese Rice Granary: Change and Impact of Japanese Occupation on the Agricultural Economy of Besuki, 1942-1945* (Yogyakarta: Galangpress, 2005).



Dr. Eko Crys Endrayadi, M. Hum,

lahir di Lamongan, 25 Agustus 1971. Alumnus S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana tahun 1997, S2 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada tahun 2003, dan S3 Program Studi Kajian Budaya Pascasarjana Universitas Udayana tahun 2013. Menjadi Dosen di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Jember sejak 1 Maret 1999 dan menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah FIB

Universitas Jember sejak 2014 sampai dengan sekarang. Beberapa penelitian dan buku yang pernah ditulis, antara lain: *Dinamika Frontir Perikanan Laut Di Karesidenan Besuki Sejak Era Kolonial Hingga Orde Baru*, Dikti, 2010; “Masjid Cheng Hoo: Industri Pariwisata Budaya Etnis Cina Muslim Di Surabaya; *Jurnal Historia*, Juni 2011, Vol. 6 No. 1; “*The Struggle of the Community of Sedulur Sikep its Identity in Pati Regency, Central Java*”, *Jurnal Cultur Studies Unud*, 2013; *Melacak Jejak Pejuang: Biografi R.H.Noerdhin Soetawidjaja*, Galang Press, 2015.

KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

Sejarah dan Warisan Budayanya

Buku ini merupakan upaya ke arah penyusunan gambaran sejarah yang lebih utuh mengenai Kesultanan Palembang Darussalam dan warisan sejarahnya. Tulisan-tulisan yang sudah ada mengenai Kesultanan Palembang masih bersifat fragmentaris, serta menonjolkan aspek-aspek tertentu secara terpisah.

Gambaran yang lebih utuh dipandang akan mampu memberi pemahaman yang lebih baik tentang keberadaan dan peranan yang dimainkan Kesultanan Palembang Darussalam pada masa lalu dan warisan yang ditinggalkannya. Penghapusan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1824 oleh Pemerintah kolonial Belanda membuat keberadaan Kesultanan Palembang sebagai entitas politik yang otonom berakhir.

Akan tetapi, sebagai sebuah satuan sosio-kultural, eksistensi Palembang tidak berakhir, melainkan terus berlangsung karena melekat dengan keberadaan masyarakat dan budaya Palembang sendiri. Identitas budaya dan karakter masyarakat Palembang yang masih tampak hingga sekarang ini merupakan produk dari proses sejarah yang panjang.

Jember University Press
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
Telp. 0331-330224, voip 0319
e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

